



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	10
1.4 Landasan Hukum	12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	13
1.6 Sistematika.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi.....	21
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	21
2.2 Perencanaan Kinerja.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Analisis Capaian Kinerja	31
3.3 Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Rekomendasi	66

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan Non PNS sesuai Golongan Tahun 2023.....	9
Tabel 1.2 Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	9
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	24
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
Tabel 3.2.1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas PPKB dan P3A Tahun 2022 ..	33
Tabel 3.2.1.2 Matrik Tindak Lanjut Evaluasi AKIP	33
Tabel 3.2.1.3 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023	36
Tabel 3.2.1.4 Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....	39
Tabel 3.2.2 Analisis Realisasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja	43
Tabel 3.2.3 Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD	47
Tabel 3.2.4 Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Standar Nasional/Provinsi ...	48
Tabel 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	49
Tabel 3.2.6 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2023.....	52
Tabel 3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan	54
Tabel 3.2.8 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.....8

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Wonogiri, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



MUBAROK, SKM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 199003 1 010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri selaku unsur pembantu pimpinan, didorong untuk selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kab/Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Penyusunan LkjIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri No. 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :



Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas,dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Mubarok, SKM, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

a. Sekretariat

Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas.

Fungsi : (a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas; (c) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana Dinas; (d) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas; (f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas; (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian, yaitu:

a.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penata usahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas.



a.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , terdiri dari kelompok jabatan Fungsional yang terdiri 2 (dua) sub koordinator yaitu:

b.1 Sub Koordinator Pengendalian Penduduk

b.2 Sub Koordinator Keluarga Berencana

Sub koordinator tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



c. Bidang Keluarga Sejahtera

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaran pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga Sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemeritah bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang deberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 2 (dua) sub koordinator yaitu:

c.1 Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga,

c.2 Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga.

Sub koordinator tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu :

d.1 Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan,.

d.2 Sub Koordinator Perlindungan Anak .

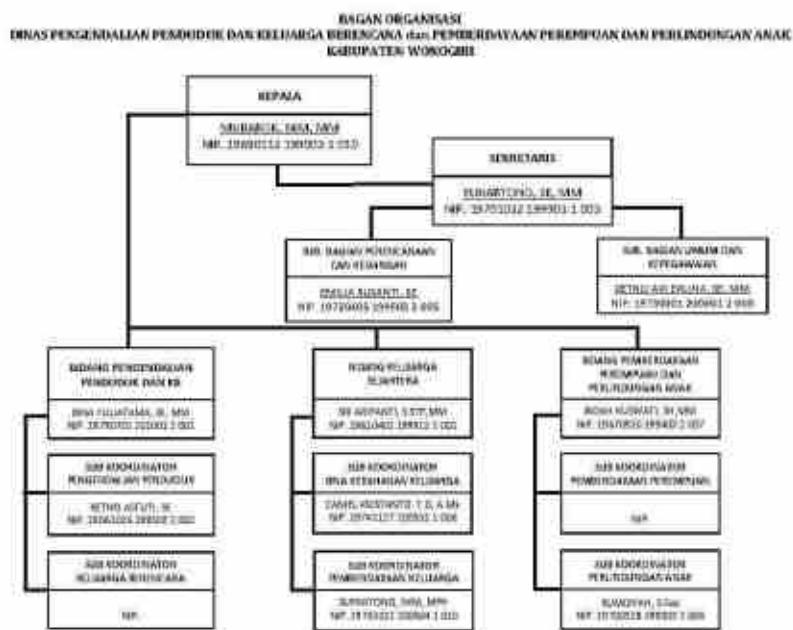
Sub koordinator tersebut bertanggung jawab terhadap kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 Sub Koordinator. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 109 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri



Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) orang PNS dan 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Non ASN termasuk tenaga lapangan. Jika dilihat dari komposisi golongan, Golongan IV/b sebesar 4,34% atau 2 orang, Golongan IV/a sebesar 8,69% atau 4 orang, Golongan III/d sebesar 8,69% atau 4 orang, Golongan III/c sebesar 2,17% atau 1 orang, Golongan III/b sebesar 6,52% atau 3 orang, Golongan III/a sebesar 2,17% atau 1 orang, Golongan II/d sebesar 2,17% atau 1 orang, Golongan II/c sebesar 2,17% atau 1 orang, sedangkan untuk pegawai Non PNS sebesar 63,04 % atau 29 orang.



Tabel 1.1

Jumlah PNS dan Non PNS sesuai Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV/b	2	4,34
2.	IV/a	4	8,69
3.	III/d	4	8,69
4.	III/c	1	2,17
5.	III/b	3	6,52
6.	III/a	1	2,17
7.	II/d	1	2,17
8.	II/c	1	2,17
9.	Non PNS	29	63,04
		46	

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 17,39% atau 8 orang berpendidikan S2, kemudian 45,65% atau 21 orang berpendidikan S1, sebanyak 4 orang atau 8,69% berpendidikan D3 dan 26,08% atau 12 orang berpendidikan SMA dan 2,17% atau 1 orang berpendidikan SMP.

Tabel 1.2

Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	8	17,39
2.	S1	21	45,65
3.	D3	4	8,69
3.	SMA	12	26,08
4.	SMP	1	2,17
		46	



1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

A. Aspek strategis

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, maka penting pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak, hal ini dikarenakan masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.



B. Permasalahan Utama

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Perlindungan Perempuan dan Anak yang belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemenuhan cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan.
- c. Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemahaman korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk berani melapor.
- b. Meningkatkan pengembangan lembaga penyedia pelayanan kualitas keluarga.
- c. Meningkatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak bagi Keluarga.
- d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak yang optimal.
- e. Advokasi kebijakan dan peningkatan pendampingan pemenuhan hak anak pada lintas sektor.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.
- b. Masih rendahnya Rasio Akseptor KB.
- c. Masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap program Bangga Kencana;



- b. Meningkatkan Kompetensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Meningkatkan kesertaan KB Pria;
- d. Meningkatkan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
- e. Peningkatan sarana penunjang pelayanan KB;
- f. Peningkatan pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Peningkatan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- h. Peningkatan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

1.4 Landasan Hukum

LKjIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Portable Generating Set	1	Unit
2	Portable Water Pump	1	Unit
3	Kendaraan Mobil Unit Penerangan	2	Unit
4	Kendaraan Unit Pelayanan	1	Unit
5	Kendaraan Unit Pelayanan Akseptor	2	Unit
6	Kendaraan Unit PPPA	1	Unit
7	Kendaraan Angkutan Barang	1	Unit
8	Kendaraan Operasional	2	Unit
9	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Operasional PKB	80	Unit
10	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Operasional PPPA	2	Unit
11	Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Anti Stunting	2	Unit
12	Troli	1	Unit
13	Mesin Ketik	1	Unit
14	Lemari Besi/Metal	1	Buah
15	Lemari kayu	35	Buah
16	Rak Besi	9	Buah
17	Rak Kayu	42	Buah



18	filling Cabinet	6	Buah
19	Kardek Kayu	1	Buah
20	Lemari Kaca	49	Buah
21	Papan Visual/Papan Nama	37	Buah
22	Papan Instansi	1	Buah
23	Papan Pengumuman	28	Buah
24	White Board	29	Buah
25	Penghancur Kertas	1	Buah
26	LCD Proyektor	12	Unit
27	Meja Kerja Kayu	110	Buah
28	Kursi Besi Metal/Kursi Kerja	73	Unit
29	Sice	5	Set/paket
30	Kursi Panjang Besi/Metal	2	Buah
31	Meja Rapat	100	Buah
32	Tempat tidiu kayu	1	Buah
33	Meja Resepsionis	2	Set/paket
34	Meja Bundar	10	Buah
35	Meja 1/2 Biro	45	Buah
36	Kursi Rapat	1.046	Buah
37	Kursi Tamu	1	Set
38	Kursi Putar	8	Buah
39	Lemari pakaian	1	Buah
40	Gorden	7	Set/paket
41	Taplak Meja Prasmanan	1	Set/paket
42	Taplak Meja bundar	11	Buah
43	Backdroop Pertemuan	1	Set/paket
44	Pallet Lantai	10	Buah
45	Vacum Cleaner	1	Buah
46	AC Split	21	Unit
47	Kipas Angin	105	Buah
48	Exhause Fan	14	Buah
49	Kompor Gas	2	Buah
50	Alat Dapur	1	Buah
51	Televisi	2	Buah
52	Cassete Recorder	35	Buah
53	Sound System	1	Unit
54	Wireless (TOA)	27	Unit
55	Unit Power Supply (UPS)	2	Unit



56	Camera Video	1	Buah
57	Taplak Meja & Sarung Kursi	1	Set
58	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah
59	Tiang Bendera	2	Buah
60	Tangga Aluminium	1	Buah
61	Mimbar/Podium	2	Buah
62	Switching Listrik Genset	1	Buah
63	Tape Mini Compo LG	2	Buah
64	Deep Soup Bowl	2	Buah
65	Alat Pemadam/Portable	1	Set
66	Meja Kerja Pejabat	13	Buah
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Buah
68	Meja Tamu Biasa	1	Buah
69	Kursi Kerja Pejabat	20	Buah
70	Lemari Buku Arsip	22	Buah
71	Audio Amplifier	1	Buah
72	Microphone/Wireless MIC	3	Set
73	Camera + Attachmen	1	Buah
74	LCD Proyektor BenQ MW550	25	Unit
75	Microphone Table Stand	1	Buah
76	CCTV	4	Buah
77	Pointer	2	Buah
78	Meja Projector	2	Buah
79	Camera Electronic (SLR)	1	Buah
80	Layar Film	2	Buah
81	Camera Digital	2	Buah
82	Pesawat Telephone	1	Buah
83	Tablet Samsung	53	Unit
84	Faxsimile	1	Unit
85	Loudspeker	4	Buah
86	Tensimeter	4	Buah
87	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah
88	Lemari Obat (Kaca)	25	Buah
89	Service Model Kit (Sterilisator uap)	3	Set
90	Service Model Kit (IUD Kit)	12	Set
91	Service Model Kit (Gynbed)	12	Set
92	Service Model Kit (Implant Kit)	25	Set



93	Service Model Kit (KIE Kit)	9	Set
94	Service Model Kit (Minilap Kit)	1	Set
95	Service Model Kit (APE)	6	Set
96	Service Model Kit (Genre Kit)	6	Set
97	Service Model Kit (KIE Kit)	25	Set
98	Gynecological Examining Table (Obgynbed)	42	Set
99	Minilaparatomy Instrument Set	1	Set

1.6 Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP Dinas PPKB dan P3A Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKjIP, Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja



- tahun ini dengan tahun lalu;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
 4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten wonogiri Tahun 2021 – 2026, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis



Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional bagi visi dan misi Program Bupati guna menentukan pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penunjang Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021–2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021–2026 merupakan keberlanjutan dari implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode 2021–2026. Capaian selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintah konkuren, unsur pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang, urusan pemerintahan, unsur pengawasan, urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting dalam penetapan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 -2026 yaitu :

“ Mewujudkan Wonogiri yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “ dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan tersebut adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaianya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Terhadap Visi jangka menengah Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



2.1.2. Misi

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahu 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. Menjadikan rakyat wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
- b. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Agar Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 – 2026 meliputi 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

Empat Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
2. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan aksebilitas dan pengembangan wilayah.

Sebelas Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksebilitas pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
4. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
5. Terwujudnya birokrasi yang kapabel.
6. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.
7. Meningkatnya pertumbuhan investasi, Menurunnya kemiskinan, Menurunnya pengangguran.



8. Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas.
9. Meningkatnya akses air baku.
10. Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup.
11. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, memonitor dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran penting mendukung pencapaian Visi dan seluruh Misi Pembagunan Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terutama pada Misi 1 yaitu Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Mendukung Tujuan 1 : yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Serta mendukung sasaran ke 3 : Yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, sebagaimana telah ditetapkan tujuan, sasaran, Indikator kinerja dan target sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100
		1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	100
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	-	-	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,27	0,265	0,260	0,255	0,250	0,245
		2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	77,50	78,32	78,85	79,00	79,20	79,20
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	9,43	8,47	8,12	7,59	7,44	7,44
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	-	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	43	43	44	45	45	46
		3.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	75,50	75,50	76,50	77,50	78,50	79,50
				Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	1	2	3	4	5
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	85	85	85	85	85



			Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	0	0	1	1	1	1
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	65	70	75	80	80,5	85,5

2.2 Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah tertuang dalam Renstra tahun 2021 – 2026.

Adapun penetapan Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2023
1	2	3		4	5	7
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Persen	100
		1.1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	-	-	Percentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,260
		2.1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	78,85
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	8,12



3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	-	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	44
	3.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik		Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	76,50
				Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	2
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85
				Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	1
				Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian



Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa kali perubahan kinerja dikarenakan adanya pergantian pejabat dan perubahan anggaran. Uraian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 Persen
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	78,85 Persen
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8,12 Persen
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	76,50 Angka
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	2 Angka
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Angka
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		Indeks Profesionalitas ASN	75 Angka



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	$\geq 91\%$	Green
2	Baik	76 – 90,99%	Light Green
3	Cukup	66 – 75,99%	Yellow
4	Kurang	51 – 65,99%	Yellow
5	Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dan sebanyak 12 indikator kinerja (*outcomes*)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi



pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 57 tahun 2023.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja perubahan terakhir Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini :

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Madya	100	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	78,85	79,40	100,70	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,12	6,72	117,24	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	76,50	71,36	93,28	Sasaran	Hasil penilaian Sakip Inspektorat Kab. Wonogiri
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	3	150	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	88,80	104,47	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	2	200	Sasaran	Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75	72,76	97,01	Sasaran	Hasil penilaian IP ASN BKD Kab. Wonogiri

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Sasaran Strategis sebagai berikut :

Pada tahun 2023 ada beberapa capaian kinerja yang tidak mencapai diantaranya Indikator Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dengan capaian 93,28% hal ini dikarenakan adanya metode parameter penilaian yang berbeda dari tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga diperlukan upaya sinkronisasi guna pemenuhan capaian indikator. Selain itu perlu koordinasi dangan lintas OPD guna peningkatan capaian pada tahun berikutnya. Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022.



Tabel 3.2.1.1
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas PPKB dan P3A Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	N/A	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	N/A	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	N/A	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	N/A	17,50
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		N/A	71,36
			N/A	BB

Berdasarkan tabel hasil evaluasi, terdapat 8 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sebagaimana matrik tindaklanjut evaluasi AKIP.

Tabel 3.2.1.2
Matrik Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja beserta capaian kinerja menjadi sebuah dokumen perencanaan kinerja yang diturunkan pada	Merumuskan perencanaan kinerja beserta capaian kinerja secara berjenjang	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Penyusunan SKP tepat Waktu ,Penyusunan Target Kinerja tepat Waktu, melaksanakan rapat penyusunan BOKB 2024.



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	perjanjian kinerja atasanya kemudian diformalkan dan dipublikasikan di web resmi OPD /Kabupaten dengan tepat waktu			
2	Melakukan Sinkronisasi dan FGD di setiap level/jenjang untuk memastikan keselarasan dokumen perencanaan satu dengan yang lainnya guna mendukung pencapaian IKU yang telah disepakati dan menjadikan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja	Melakukan Sinkronisasi/Koordinasi/FGD di level OPD	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Rapat kordinasi monev pengukuran kinerja TW III dan IV
3	Mengupayakan Secara maksimal untuk memenuhi target Kinerja	Melakukan koordinasi capaian kinerja OPD, Melakukan koordinasi lintas sektor guna pencapaian target kinerja, Melakukan koordinasi sampai tingkat lini lapangan	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Evaluasi kinerja triwulan III dan triwulan IV, Koordinasi pencapaian Kabupaten Layak Anak, Melakukan koordinasi pencapaian program bangga kencana, Rapat Koordinasi tindak lanjut FKP dan SKM



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
4	Melakukan Pemantauan dan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan Tehnologi Informasi Aplikasi E SAKIP	Melakukan koordinasi capaian kinerja OPD, Menginput capaian kinerja di E Sakip dari Eselon II s/d Staf setiap triwulan dan tahunan	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Evaluasi kinerja sampai triwulan ke IV pada Aplikasi E SAKIP, Print Out E sakip menu laporan kemudian dilegalkan dari eselon II s.d Staf mulai dari triwulan dan tahunan
5	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu langkah perbaikan atas tindak lanjut rekomendasi untuk pemenuhan capaian kinerja sebagai bentuk kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan Kooerdisinasi dan Evaluasi pengukuran kinerja pada penyusunan LKJIP yang menjadikan analisis	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Rapat koordinasi penyusunan LKJIP dan laporan kinerja pada LKJIP
6	Menyesuaikan aktuvitas berdasarkan tugas dan fungsi individu untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja	Menyesuaikan SKP berdasarkan TUSI ke SITAMPAN, Surat himbauan pimpinan guna penyelarasian kinerja antara SKP dengan TUSI selanjutnya dijabarkan SITAMPAN	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Screen Shot aktivitas dari SITAMPAN disandingkan dengan SKP sama, Surat himbauan kepala Dinas
7	Melakukan Rapat Koordinasi terkait evaluasi Akuntabilitas Kinerja Secara Mendalam,berjenjang	Melakukan koordinasi capaian kinerja OPD, Mengunggah evaluasi kinerja dalam aplikasi e sakip	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Evaluasi kinerja sampai triwulan ke IV pada Aplikasi E SAKIP, Rapat koordinasi



	dan berkala hasil evaluasi di input dalam aplikasi E SAKIP secara berjenjang dan berkala kemudian diformalkan secara berjenjang dan berkala			penyusunan LKJIP, Laporan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi e sakip
8	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Menindaklanjuti semua Rekomendasi AKIP, Mempedomani Rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Surat tanggapan atas LHE Inspektorat

Sedangkan untuk Indikator Profesional ASN hanya tercapai sebesar 97,01% dikarenakan masih banyaknya ASN dari 7 yang menduduki jabatan Struktural, 6 yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti Diklat Aparatur sesuai dengan Jabatannya dan juga adanya ASN yang belum tergerak untuk meningkatkan kapasitas SDM secara mandiri sehingga nilai pengembangan kopetensi ASN masih rendah.

Tabel 3.2.1.3
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	NILAI IP ASN
1	MUBAROK, SKM.MM	19690212 199003 1 010	Pembina Tk.1 IV/b	Kepala Dinas PPKB dan P3A	78
2	SUHARTONO, SE,MM	19701022 199903 1 003	Pembina Tk. 1 ,IV/b	Sekretaris	78
3	INDAH KUSWATI, SH, MM	19670920 199403 2 007	Pembina IV/a	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	68
4	BINA YULIATAMA, S.E,M.M	19790701 201001 2 001	Penata Tk. I III/d	Kabid Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	63



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	NILAI IP ASN
5	SRI ARIYANTI, S.STP,MM	19810401 199912 2 001	Pembina IV/a	Kabid Keluarga Sejahtera	78
6	SUPARTONO, SKM, MPH	19761021 200604 1 010	Pembina IV/a	JF Penata KKB Ahli Muda	78
7	RETNO ASTUTI, SE	19661026 199503 2 002	Penata Tk I III/d	JF Penata KKB Ahli Muda	90
8	RUMDIYAH, S.Sos	19700528 199303 2 006	Penata Tk I III/d	JF Penata KKB Ahli Muda	90
9	EMILIA SUSANTI, SE	19720405 199603 2 005	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	76
10	RETNO ARI ERLINA, SE, MM	19730301 200801 2 003	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	63
11	DANIEL KRISTANTO TEGUH DARMOJO, A.MK	19741127 200501 1 006	Penata III/c	JF Penata KKB Ahli Muda	78
12	ENIE DWI KARYANINGRUM, S.K.M, M.M	19740707 199702 2 001	Pembina , IV/a	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	70,5
13	RIMA MAHANANI,SE	19710527 200701 2 009	Penata Muda Tk. I III/b	Penyusun Laporan Keuangan	69,5
14	YUNI SAPTANTI,SE	19710601 200701 2 015	Penata Muda Tk. I III/b	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	69,5
15	AGUS PURWANTO,SE	19760809 201001 1 003	Penata Muda III/a	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	69,5
16	SUNARTO	19730813 201001 1 003	Pengatur II/d	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	50
17	DEPI MAEMONA, A.Md	19890824 202012 2 002	Pengatur II/c	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	68
JUMLAH TOTAL					1237
NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN					72,76



Langkah yang telah diambil memotifasi ASN untuk melanjutkan pendidikan guna pengembangan SDM secara mandiri. Pada Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri sudah ada 2 pegawai yang melanjutkan pendidikan secara mandiri.

Indikator yang tercapai 100% yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan hal ini menunjukkan bahwa korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di kabupaten Wonogiri sudah mendapatkan pendampingan dan penanganan. Pada tahun 2023 indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan sehingga capaiannya 100%, tetapi upaya penggerakan dengan langkah pemenuhan target indikator KLA terus dilakukan guna pencapaian yang lebih baik. Sedangkan Capaian kinerja yang melebihi target 100% ditunjukan pada indikator indikator Rasio Akseptor KB dengan capaian kinerja 100,70% hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonogiri Rasio perserta KB sudah baik hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan dampak program diantaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan kawin anak, hal tersebut juga didorong dengan terpenuhinya indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) dengan capaian kinerja 117,24% pada tahun 2023. Indikator Jumlah Agen Perubahan yang direncanakan 2 dapat terealisasi 3 agen perubahan pada Dinas PPKB dan P3A sehingga capaian kinerjanya mencapai 150%. Nama - nama agen perubahan pada Dinas PPKB dan P3A adalah

1. Supartono, SKM, MPH

Di Kabupaten Wonogiri hanya ada 66 Kampung KB, dengan adanya agen perubahan guna mendorong percepatan Pembentukan Kampung KB sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 3 Tahun 2022 saat ini di Kabupaten Wonogiri telah terbentuk 255 Kampung KB.



2. Yuni Saptanti, SE

Pengelolaan Keuangan pada Dinas PPKB dan P3A, yang sebelumnya cara pembelanjaan kegiatan dilakukan metode cash, dengan adanya agen perubahan mendorong pembelanjaan dilakukan secara transfer atau non tunai. Pembelanjaan secara transfer pada tahun 2022 sebesar 56,71% dan pada tahun 2023 sebesar 77,83%

3. Depi Maemona, A.Md

Pengelolaan PPID Dinas PPKB dan P3A sebelumnya informasi publik belum dilaksanakan secara maksimal, dengan adanya agen perubahan mendorong pelaksanaan informasi publik lebih optimal. Dari skor tahun 2022 sebesar 95 dan pada tahun 2023 sebesar 100.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 104,47%, Nilai Indeks Kepuasan (IKM) Dinas PPKB dan P3A sebagaimana Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, tempat survei pada Dinas PPKB dan P3A, waktu survei pada bulan Juli 2023 dengan responden sejumlah 43 orang.

Tabel 3.2.1.4
Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7	Column 8	Column 9	Column 11
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4
2	3	3	3	4	3	3	3	2	3
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
5	4	3	3	4	3	3	3	3	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

7	4	4	3	4	3	3	3	3	4
8	4	4	3	4	3	3	3	3	4
9	4	3	3	4	3	3	3	3	4
10	4	3	3	4	3	4	4	3	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	4	3	4	4	4	3	3	4
13	4	3	3	4	4	3	4	4	4
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	3	4	3	4	3	3	4	3	4
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4
19	4	3	3	4	4	3	4	3	4
20	3	3	2	4	2	3	3	3	4
21	3	3	3	4	3	3	3	3	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	3	3	4	4	4	3	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4
30	3	3	3	4	3	3	4	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	3	3	3	4	2	3	3	2	1
33	3	3	3	4	3	3	3	3	4
34	4	4	3	4	3	4	4	4	4
35	3	3	3	4	3	3	3	2	3
36	4	3	3	4	3	3	3	3	4
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4
38	4	4	3	4	4	4	4	4	4
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4
40	3	3	3	4	3	3	3	3	4
41	4	3	3	4	3	3	3	3	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	3	4	3	4	4	4	4
ΣNilai /Unsur	148	141	131	172	137	139	142	136	166
NRR /	3,610	3,439	3,195	4,195	3,341	3,390	3,463	3,317	4,049
Unsur									
NRR	0,401	0,382	0,355	0,466	0,371	0,376	0,384	0,368	0,449
tertbg/									



unsur									
								*)	**)
SKM Unit pelayanan								3,55	88,80
Keterangan : - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat - *) = Jumlah NRR SKM tertimbang - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 12 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11	No.	Unsur Pelayanan		Rata-Rata					
	U1	Persyaratan pelayanan							
	U2	Prosedur Pelayanan							
	U3	Waktu Pelayanan							
	U4	Biaya/Tarif Pelayanan							
	U5	Produk Jenis Pelayanan							
	U6	Kompetensi Pelaksana							
	U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan							
	U8	Maklumat Pelayanan							
	U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan							
SKM UNIT PELAYANAN :									
Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50 B (Baik) : 62,51 - 81,25 D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75									

Indikator Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A tercapai 200% dari jumlah inovasi yang ditargetkan 1 dapat terealisasi 2 inovasi yang dihasilkan. Inovasi Dinas PPKB dan P3A adalah :

1. RELASI (Remaja Lawan Stunting)

Stunting Campaign RELASI (Remaja Lawan Stunting) adalah sebuah inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan KIE kreatif kepada remaja di Kabupaten Wonogiri berbasis digital. Karena KIE yang hanya sekedar sosialisasi satu arah kurang diminati remaja dan tak jarang tidak membuat hasil yang diharapkan. Melalui aksi kampanye remaja lawan stunting, remaja tidak hanya sekedar menerima sosialisasi, namun remaja diajak turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi



tentang pencegahan stunting. Dengan adanya RELASI terlihat jelas peran remaja dalam ikut serta lawan stunting.

2. MOP (Medis Operasi Pria)

Inovasi MOP sebuah Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluhan KB (PKB) dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) dalam pencapaian akseptor KB Medis Operasi Pria (MOP). Dengan adanya inovasi ini semakin tergerak Pria dalam Ber-KB.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021–2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2.2
Analisis Realisasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Pratama	100	Madya	Madya	100	Madya	Madya	100
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	77,50	77,40	99,87	78,32	79,16	101,07	78,85	79,40	100,70
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	9,43	7,89	116,33	8,47	6,82	119,48	8,12	6,72	117,24
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	n/a	n/a	n/a	75,50	76,18	100,90	76,50	71,36	93,28



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
	Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100	2	3	150
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	85	86,54	101,81	85	88,80	104,47
	Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	1	2	200	1	2	200
	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	70	69,16	98,80	75	72,76	97,01



Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra Strategis 2021

- 2026 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Wonogiri. Apabila pengukuran ini dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dua indikator yang diperjanjikan yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 capaiannya sama 100% dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 53 korban sudah dilakukan penanganan. Sehingga pada tahun 2023 Dinas PPKB dan P3A konsisten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, indikator yang kedua adalah Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023 tecapai Madya sama dengan target yang diperjanjikan, dibanding tahun 2022 sama tercapai 100%.

Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk terdapat dua indikator yang diperjanjikan yaitu Rasio Akseptor KB pada tahun 2022 lebih tinggi capainnya dibandingkan dengan tahun 2023 tetapi apabila kita lihat dari realisasi tahun 2023 melebihi realisasi pada tahun 2022.

(Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) dikali 100%

(119.270 dibagi 150.218) x 100% = 79,40%.

Dengan rumus perhitungan capaian (Realisasi dibagi Rencana dikali 100%)
79,40 dibagi 78,85 x 100% = 100,70%

Indikator yang kedua adalah Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) 117,24%, capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 119,48% tahun 2023 lebih rendah



tetapi apabila dilihat dari realisasi tahun 2023 masih lebih baik dibanding tahun 2022.

Rumus cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)

(Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Tunda (IAT) ditambah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%

$$((10.094) : 150.218) \times 100\% = 6,72\%$$

Rumus capaian :

2 x rencana - realisasi dibagi rencana x 100% dengan asumsi (Semakin rendah realisasi semakin tinggi capaianya)

$$(2 \times 8,12) - 6,72 \text{ dibagi } 8,12 \times 100\% = 117,24\%$$

Pada sasaran Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik ada 5 indikator dalam pengukurannya yaitu Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik pada tahun 2023 tercapai 93,28% lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, hal ini dikarenakan metode dan indikator penghitungannya berbeda sehingga secara umum rata-rata nilai SAKIP tiap OPD menurun. Komponen penilaian evaluasi SAKIP adalah Perencanaan Kinerja 21,00, Pengukuran Kinerja 21,60, Pelaporan Kinerja 11,25 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 17,50.

Indikator jumlah agen perubahan pada tahun 2023 tercapai 150% hal ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2023 terdapat 3 agen perubahan sebagai Roll model sehingga melebihi dari target yang ditetapkan 2 agen perubahan. Indikator yang ke tiga adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 104,47% pada tahun 2023 capaian indikator ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2022 101,81%. Diharapkan kedepan semakin baik dan memuaskan tingkat



pelayanan Dinas PPKB dan P3A kepada masyarakat. Indikator jumlah inovasi Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sama. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2023 tercapai 97,01% hal ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 hal ini dikarenakan metode penghitungan yang berbeda.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.2.3
Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Sangat Baik
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Utama	n/a	Akan tercapai
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,40	79,20	100,25	Sudah melebihi target RPJMD
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	6,72	7,44	109,67	Sudah Melebihi target RPJMD
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	71,36	79,50	95,82	Akan tercapai
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	5	20,00	Akan tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,80	85	101,81	Sudah Melebihi target RPJMD
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	1	200,00	Sudah Melebihi target RPJMD
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	72,76	85,5	80,89	Akan tercapai



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional/Provinsi

Tabel 3.2.4

Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Standar Nasional/Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	KLA	n/a
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	79,40	62,93	126,84
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	6,72	7,70	107,83
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	71,36	n/a	n/a
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	3	n/a	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,80	n/a	n/a
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	n/a	n/a
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	72,76	n/a	n/a

Apabila dibandingkan dengan target Standar Nasional ada 2 indikator yang sudah sangat baik, sehingga ini perlu dipertahankan untuk pencapaian tahun berikutnya. 2 indikator yang sudah melampaui target standar Nasional tetapi tidak serta merta hal ini menyurutkan semangat kinerja untuk capaian



kinerja yang lebih baik, karena standar RPJMD kita lebih tinggi dari standar nasional, sehingga perlu terus meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya. Ada beberapa indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan target nasional, karena tidak ada target dari indikator nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Tabel 3.2.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	- Sudah adanya SATGAS PPA, Sudah tersedianya Nomor layanan pengadaan P2TP2A, Sudah adanya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan anak dan Adanya koordinasi antar lembaga layanan	- Penindakan tegas terhadap perlakuan KDRT sehingga memberikan efek jera dan Memberikan inisiasi terkait pencegahan terhadap Perempuan dan Anak di 25 Kecamatan
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	Madya	Madya	100	- Adanya lembaga forum anak, Pengembangan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, desa/kelurahan layak anak, kesehatan ramah anak dan Peningkatan pemenuhan hak anak khususnya di perlindungan anak	- Sosialisasi tentang pengembangan Kabupaten Layak anak, Pembentukan kelembagaan Forum Anak sampai ditingkat terawah, Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak, Advokasi pengembangan SRA , Yankes Layak Anak dan Kecamatan, Desa/Kel Layak Anak



**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak**

2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	78,85	79,40	100,70	-Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah. -Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	8,12	6,72	117,24	- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja. -Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	76,50	71,36	93,28	Komitmen bersama dalam pencapaian SAKIP lebih baik dan Ketepatan dalam membuat laporan tetapi pada tahun 2023 ada indikator penilaian yang berbeda dibandingkan tahun 2022 sehingga nilai SAKIP belum dapat tercapai.	Meningkatkan pencapaian kinerja.
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	2	3	150	Mendorong pegawai untuk mempunyai peran sebagai agen perubahan	pemilihan agen perubahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	88,80	104,47	Meningkatkan pelayanan Dinas PPKB dan P3A	Forum Konsultasi Publik dalam pelayanan publik
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	1	2	200	Menciptakan Inovasi pada beberapa kegiatan	Semakin meningkatkan Inovasi Dinas PPKB dan P3A
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75	72,76	98,8	- Tidak adanya diklat aparatur, - Masih kurangnya pengembangan Inovasi	Usulan diklat aparatur ke BKD dan menciptakan Inovasi di OPD



Apabila dilihat dari tabel Analisis Kebersihan/Kegagalan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sudah memetakan langkah – langkah solusi yang perlu dilakukan. Solusi tersebut diatas merupakan strategi peningkatan pelayanan Perlindungan Anak serta peningkatan pelayanan Program Bangga Kencana juga peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan.

Sehingga arah kebijakan yang perlu di ambil adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kwalitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat koordinasi dan komitmen dengan mitra kerja, serta meningkatkan kwalitas sumber daya manusia sampai pada tingkat lini lapangan, termasuk PPKBD dan Sub PPKBD.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan 100 (seratus). Secara lengkap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2.6
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Kondisi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1			%	100	100	100.00	1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	72.291.850	96,39
	Memungkinkan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.1 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	Tingkat	Madya	Madya	100.00	2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	24.652.477	98,61
		1.2 Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak					3. PROGRAM PEMERINTAHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	49.096.800	98,19
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				100.00	TOTAL PER SASARAN	150.000.000	146.041.127	97,36
		TINGKAT EFISIENSI 2,64 %								
		TINGKAT EFektifitas 102,71 %								
2			%	78,85	79,40	106,70	4. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	465.800.000	442.651.490	95,03
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	2.1 Rasio Akseptir KB					5. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KKB)	7.506.075.000	7.132.530.300	95,02
		2.2 Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Untertreated)	%	81,12	6,72	117,24	6. PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.443.200.000	5.315.886.800	97,66
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				108,97	TOTAL PER SASARAN	13.415.975.000	12.891.048.590	96,09
		TINGKAT EFISIENSI 12,88 %								
		TINGKAT EFektifitas 113,40 %								
3			Angka	76,50	71,36	93,29	7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.033.574.448	3.431.110.725	85,06
	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan PJA yang baik	3.1 Nilai SAKIP Dinas PPKB dan PJA yang baik	Angka	2	3	150,00				
		3.2 Jumlah Agen Perihutan Dinas PPKB dan PJA	Angka	1	2	200,00				
		3.3 Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan PJA	Angka	75	72,76	97,01				
		3.4 Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan PJA	Angka	85	88,80	104,47				
		3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan PJA	Angka				TOTAL PER SASARAN	4.033.574.448	3.431.110.725	85,06
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR				128,95				
		TINGKAT EFISIENSI 43,89 %								
		TINGKAT EFektifitas 151,59 %								
							TOTAL KESELURUHAN	17.598.649.448	16.468.200.442	93,58



Pada sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, tingkat efisiensi 2,64% dan tingkat efektifitas 102,71%, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berdampak pada efektifitas capaian sasaran. Adapun efisiensi yang dilakukan merupakan bagian dari penekanan penggunaan anggaran yang kurang mendukung capaian sasaran. Pada sasaran terwujudnya pengendalian penduduk tingkat efisiensi 12,88% tingkat efektifitas 113,40%, penyerapan anggaran berpengaruh sangat besar pada capaian sasaran. Sehingga capaian sasaran melebihi dari target yang ditetapkan, efisiensi anggaran pada sasaran ini pada program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dikarenakan adanya sub kegiatan yang digunakan untuk pendampingan keluarga belum bisa dilakukan secara maksimal. Pada sasaran meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik, tingkat efisiensi 43,89% dan tingkat efektifitas 151,59%, tingkat efisiensi ini dikarenakan belanja gaji tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi. Sehingga terlihat efektifitas sangat tinggi.

7. Analisis program/kegiatan/ yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas sebagai berikut



Tabel 3.2.7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT	188,52	Menunjang
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif	100,00	Menunjang
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota	Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	100,00	Menunjang
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Percentase Pemenuhan Hak Anak	100,00	Menunjang
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA	100,00	Menunjang
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkatan	100	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Percentase Ketersediaan data Gender dan Anak	100,00	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100,00	Menunjang
2	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	100,70	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility rate (TFR)	110,50	Menunjang
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan	100,00	Menunjang
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Percentase peningkatan peserta KB aktif	100,70	Menunjang
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKPK	100,00	Menunjang
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	100,00	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan KB di Daerah	100,00	Menunjang
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana	100,00	Menunjang
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	117,24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA	100,00	Menunjang	
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100,00	Menunjang
3	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	Angka	93,28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	Angka	150	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	100,00	Menunjang



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	104,47	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100,00	Menunjang
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	Angka	200	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100,00	Menunjang
		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	97,01	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	Menunjang
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	Menunjang



Pada sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak ada 3 (tiga) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Program yang menunjang kinerja ini rata-rata 100%. Sasaran Terwujudnya pengendalian penduduk dan terdapat 3 (tiga) program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, 2 (dua) Program capaiannya diatas 100% dan 1 (satu) program capaiannya 100% yaitu program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). Sasaran Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik terdapat 1 (satu) program yang menunjang pencapaian kinerja. Rata-rata capaian program penunjang kinerja adalah 100%. Tetapi masih diharapkan untuk dapat meningkatkan capaian guna keberhasilan yang lebih baik.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada perhitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD dan APBDP Kabupaten Wonogiri. Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2.8
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	75.000.000	72.291.850	96,39
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	67.429.250	96,33
	Sub Kegiatan Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	67.429.250	96,33
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.862.600	97,25
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.862.600	97,25
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	24.652.477	98,61
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.652.477	98,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	24.652.477	98,61
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	49.096.800	98,19
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.096.800	98,19
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	50.000.000	49.096.800	98,19
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4.033.574.448	3.431.110.725	85,06
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	21.895.900	99,52
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.896.000	99,48
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.999.000	100,00



	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.723.586.048	2.386.566.833	87,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.722.586.048	2.385.566.833	87,62
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.000.000	168.514.100	97,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	98.991.500	98,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	4.995.000	99,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	11.999.800	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	52.527.800	95,51
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.988.400	789.737.252	75,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	86.850.400	79.311.176	91,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	963.138.000	709.426.076	73,66
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000	64.396.640	99,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	59.412.140	99,02
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	2.500.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	2.484.500	99,38
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	465.800.000	442.651.490	95,03
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20.000.000	18.511.000	92,56
	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	20.000.000	18.511.000	92,56
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	445.800.000	424.140.490	95,14
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100.200.000	93.268.100	93,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	231.600.00	231.600.000	100,00
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	114.000.000	99.272.390	87,08
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.506.075.000	7.132.530.300	95,02
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.160.750.000	2.089.370.000	96,69
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	310.000.000	306.190.000	98,77
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	217.000.000	212.236.000	97,80



	Serta Media Luar Ruangan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	325.000.000	325.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.203.750.000	1.189.764.000	98,84
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	56.180.000	70,23
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	878.000.000	878.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	290.800.000	290.800.000	100,00
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	587.200.000	587.200.000	100,00
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.413.825.000	3.088.380.300	90,46
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	42.300.000	42.300.000	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.395.042.000	1.304.500.000	93,51
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.904.983.000	1.679.878.200	88,18
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.500.000	22.740.000	89,18
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6.000.000	4.953.100	82,55
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.000.000	8.881.000	88,81
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30.000.000	25.128.000	83,76
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.078.500.000	1.076.780.000	99,84
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	13.140.000	13.140.000	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.065.360.000	1.063.640.000	99,84
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.443.200.000	5.315.866.800	97,66
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.443.200.000	5.315.866.800	97,66
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	360.000.000	232.800.000	64,67



(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)				
Sub Kegiatan Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	10.000.000	9.987.800	99,88	
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.799.990.000	4.799.880.000	100,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	265.210.000	265.210.000	100,00	
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	8.000.000	7.989.000	99,86	
JUMLAH	17.598.649.448	16.468.200.442	93,58	

Realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 capaiannya sebesar 93,58%. Secara keseluruhan realisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dikatakan lebih dari 90% hal ini dikarenakan adanya upaya pemanfaatan anggaran guna tercapainya program kegiatan. Ada beberapa Sub Kegiatan yang kurang maksimal dalam penyerapan anggaran berkaitan dengan adanya efisiensi Nilai Kontrak Pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran, tetapi secara fisik sudah tercapai 100%, sub kegiatan dimaksud adalah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tercapai 88,18% dan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar 64,67%. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK tercapai 70,23% dikarenakan Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2023 hanya melakukan sampling 1 kecamatan dalam pelaksanaan



Audit Kasus Stunting sedangkan kecamatan yang lain dilakukan oleh OPD lain dengan sasaran baduta dan balita. Langkah kedepan pelaksanaan sampling sasaran Audit Kasus Stunting dilakukan di 25 Kecamatan.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hanya ada 2 Indikator yang belum dapat tercapai, sehingga capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2023 rata-rata 118,07%.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 17.598.649.448 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.468.200.442 (enam belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), sehingga pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri terdapat Sisa Anggaran Rp. 1.130.449.006 (Satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam rupiah) sehingga capaian Realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak 93,58%.



4.2 REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri. Guna perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran guna pencapaian indikator kinerja dengan selaku melakukan koordinasi lintas sektor.



Lampiran :

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUBAROK, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO

Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No (1)	Tujuan dan Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tujuan Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 %
1.1	Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
2.	Tujuan Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,260 %
2.1	Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	78,85 %
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8,12 %
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai kematangan organisasi Dinas PPKB dan P3A yang baik	44 Angka
3.1	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	76,50 Angka
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	2 Angka
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	75 Angka
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	85 Angka

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 75.000.000	APBD
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 50.000.000	APBD
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 25.000.000	APBD
4. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 234.200.000	APBD, APBN
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 7.737.675.000	APBD, APBN
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 5.443.200.000	APBD, APBN
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.003.574.448	APBD
TOTAL	Rp. 17.568.649.448	

Wonogiri, 2 Januari 2023





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUBAROK, SKM, MM

Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOKO SUTOPO

Jabatan : Bupati Wonogiri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI WONO
GIRI
JOKO SUTOPO

Pihak Pertama,
PENERITAHAN BUPATI
WONOGIRI
MUBAROK, SKM, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Tingkatan
2.	Sasaran Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	78,85 %
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	8,12 %
3.	Meningkatnya kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik	Nilai SAKIP Dinas PPKB dan P3A yang baik	76,50 Angka
		Jumlah Agen Perubahan Dinas PPKB dan P3A	2 Angka
		Jumlah Inovasi Dinas PPKB dan P3A	1 Angka
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB dan P3A	75 Angka
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PPKB dan P3A	85 Angka

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 75.000.000	APBD
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 50.000.000	APBD
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 25.000.000	APBD
4. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 465.800.000	APBD, APBN
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 7.506.075.000	APBD, APBN
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 5.443.200.000	APBD, APBN
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.033.574.448	APBD
TOTAL	Rp. 17.598.649.448	

Wonogiri, 23 Oktober 2023

